

---

## Pemberitaan Penolakan Pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon oleh Kompas.com dan Detik.com dalam Bingkai Robert Entman

Eva Hutri Sinaga<sup>1\*</sup>, Mutia Nurdalilah Simatupang<sup>2</sup>, Mia Dwianna Widyaningtyas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemberitaan di Kompas.com dan Detik.com, mengenai konflik penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis berita dari kedua media tersebut pada periode September 2022 melalui analisis framing model Robert N. Entman. Analisis data dilakukan terhadap berita yang mewakili informasi pada masing-masing media online, dengan melihat 4 elemen: define problem, diagnose causes, make moral judgement, dan treatment recommendation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian media massa dalam mengideologikan konflik dan dampaknya terhadap opini masyarakat yang diberitakan Detik.com dan Kompas.com memiliki framing yang berbeda. Detik.com banyak menyoroti perspektif kelompok yang menolak pembangunan gereja dan menggunakan diksi yang dapat membentuk opini negatif terhadap kelompok minoritas. Sementara Kompas.com lebih banyak menampilkan urgensi penyelesaian konflik dengan menekankan pentingnya perlindungan hak beribadah bagi kelompok minoritas. Penelitian ini juga menemukan bahwa keduanya tidak sepenuhnya menerapkan prinsip jurnalisme damai dan tidak berimbang.

**Kata-kata Kunci:** *Framing; Media; Konflik; Cilegon*

### *The Rejection of HKBP Maranatha Church Construction in Cilegon by Kompas.com and Detik.com in Robert Entman's Frame*

### ABSTRACT

This research aims to analyse the news coverage on Kompas.com and Detik.com, regarding the conflict of rejection of the construction of HKBP Maranatha Church in Cilegon. The research was conducted qualitatively by analysing news from the two media in the September 2022 period through Robert N. Entman's framing analysis model. Data analysis was conducted on news that represented information on each online media, by looking at 4 elements: define problem, diagnose causes, make moral judgement, and treatment recommendation. The results showed that the mass media presentation in ideologising the conflict and its impact on public opinion reported by Detik.com and Kompas.com had different framing. Detik.com highlighted the perspective of the group that rejected the construction of the church and used diction that could form a negative opinion of the minority group. Meanwhile, Kompas.com displays more urgency to resolve the conflict by emphasising the importance of protecting the right to worship for minority groups. This research also found that both did not fully apply the principles of peaceful and unbalanced journalism.

**Keywords:** *Framing; Media; Conflict; Cilegon*

---

\*Korespondensi: Eva Hutri Sinaga, S.I.Kom., M.I.Kom., Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jl. Raya Palka, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Pabuaran, Kota Serang, Banten 42163, Email: eva.koizora@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pemberitaan media dengan mengangkat isu yang kontroversial menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan minat masyarakat pada sebuah berita. Keadaan ini membuat banyak media baik online maupun cetak memanfaatkan kesempatan ini dalam upaya menambah jumlah pembacanya (Fithri et al., 2023). Salah satu langkah yang dilakukan media adalah dengan membingkai (framing) berita dengan menyoroti aspek-aspek tertentu dari peristiwa secara selektif sehingga membangkitkan pandangan tertentu pada peristiwa tersebut (Harsa & Rofil, 2021). Framing atas sebuah berita yang dilakukan oleh jurnalis dan para pekerja media yang terlibat dalam proses produksi berita akan memberi dampak terhadap berita yang disajikan media (cetak maupun elektronik). Barang tentu, setiap media punya standar pembingkai ( *frame* )-nya sendiri-sendiri, yang berbeda dengan standar pembingkai ( *frame* ) dari media lainnya (Mudjiyanto et al., 2023).

Faktor munculnya sebuah isu di media tidak terlepas dari peran orang-orang yang berada di dalam media tersebut. Dalam hal penentuan headline dan isi media misalnya, sangat bergantung pada redaksi dan orang-orang berpengaruh di media tersebut (Aslam, 2021) . Argumentasi pada berita di sebuah media dipengaruhi sejumlah faktor yang dibawa oleh wartawan ketika menuliskan sebuah peristiwa. Faktor-faktor tersebut yakni latar belakang etnis, agama, pendidikan sampai ideologi media dimana ia bekerja, sehingga wartawan dikatakan akan sulit untuk bersikap netral (Harcup, 2020). Selain itu menurut Harcup (2020) berita yang ditampilkan, juga didukung oleh faktor ekonomi politik industri media, dengan konsentrasi kepemilikan mereka yang dikombinasikan dengan upaya mengikuti deregulasi, yang membuat media cenderung ke arah "degradasi politik" dan penerimaan "neoliberal" .

Kondisi seperti ini semakin terlihat saat pemberitaan mengenai konflik . setiap media mempunyai perspektif tersendiri ketika mengonstruksi konflik dalam berita (Rahmawati et al., 2024). Banyak elemen yang dapat memengaruhi media dalam membingkai berita, seperti ideologi dan tujuan media, orang-orang yang terlibat dalam pengemasan berita, serta konteks dan situasi ketika media mencoba meliput peristiwa konflik (Rahmawati et al., 2024). Hasil penelitian Rahmawati (2024) mengenai pemberitaan tentang konflik antaretnis di Babarsari ini menunjukkan bahwa konsepsi *frame* sosiologi dan *frame* psikologi masing-masing memiliki peran penting dan tidak dapat dikatakan salah satu lebih baik atau lebih buruk. Setiap *frame* menawarkan pandangan yang berbeda dalam memahami media ketika membingkai konflik antar etnis di Babarsari.

Framing media mengenai berita dapat dipengaruhi berbagai faktor yakni orientasi politik, nilai-nilai editorial, dan latar belakang redaksi (Efendi et al., 2024). Hal ini menjadikan berita yang sama dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh media, akibat pemahaman yang berbeda mengenai peristiwa dan pendekatan yang berbeda dalam mengonstruksi cerita. Framing berita juga berkaitan dengan pemilihan berita yang diliput dan tidak diliput, serta penggunaan bahasa dan gambar dalam upaya memperkuat ide-ide tertentu (Efendi et al., 2024).

Pemberitaan mengenai peristiwa penolakan pembangunan gereja HKBP Maranatha di Cilegon menjadi hal menarik untuk ditelaah, karena gesekan antar agama menjadi bahan pemberitaan sejumlah media, sehingga seolah-olah keberadaan gereja memang tabu untuk dibangun di Kota Cilegon. Berbagai media khususnya media online memberitakan isu tersebut secara rinci maupun sekilas. Beberapa media membingkai (*framing*) berita aksi damai pada September 2022 mengenai penolakan pembangunan rumah ibadah dengan

gaya masing-masing media sehingga masyarakat banyak membicarakan hal tersebut.

Pemberitaan kompas.com (Saptohutomo, 2022), Minggu (11/09/2022), sejumlah elemen masyarakat sepakat untuk menolak pembangunan gereja dikarenakan dasar perjanjian Bupati Serang Ronggo Waluyo Nomor 189/Huk/SK/1975, tertanggal 20 Maret. Kesepakatan tersebut menimbulkan terjadinya potensi konflik sosial laten di Kota Cilegon (Sjafari, 2014). Stereotip yang salah timbul dari masyarakat Kota Cilegon terhadap umat di luar agama Islam, termasuk umat Kristiani, emosi keagamaan yang berlebihan, penolakan dari komunitas lain, dan perasaan terancam oleh keberadaan rumah ibadah lain yang lebih megah (Arifinsyah & Fitriani, 2019)

Selain itu keadaan semakin memanas ketika adanya pemberitaan terkait aksi damai penolakan pendirian rumah ibadah tersebut ternyata didukung oleh Walikota Cilegon dengan bersama-sama menandatangani petisi penolakan pendirian rumah ibadah. Seperti yang dilansir oleh media online detik.com (Alfons & Iqbal, 2022), Jum'at (09/09/2022) bahwa aksi damai penolakan pendirian rumah ibadah justru didukung oleh Walikota Cilegon dan wakilnya yang turut serta menandatangani sebuah petisi berupa spanduk penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon.

Polemik penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon menurut hasil penelitian Lestari & Randisa (2024), terjadi akibat praktik intoleransi tanpa adanya kekerasan. Disebut demikian karena telah terjadi tindakan diskriminatif dan ada pihak yang menolak serta menentang pembangunan rumah ibadah, Gereja HKPB Maranatha yang diajukan oleh umat Kristen di Cilegon (A. Lestari & Randisa, 2024).

Konflik penolakan pembangunan rumah ibadah, khususnya pembangunan gereja merupakan salah satu dari sekian banyak konflik laten yang terjadi di Kota Cilegon. Wujud penolakan tersebut sebetulnya sudah terjadi dari tahun 1995, dimana sarana dan prasarana tempat tinggal dijadikan sebagai tempat ibadah sehingga menimbulkan gesekan dengan masyarakat sekitar. Tercatat terdapat kurang lebih 10 kali tindakan demonstrasi oleh masyarakat Kota Cilegon yang mayoritas umat Islam untuk menuntut penutupan gereja atau rumah ibadah bagi umat Kristiani (Riansyah et al., 2021). Kementerian Agama Republik Indonesia juga membenarkan hal tersebut melalui website resmi kemenag.go.id bahwa sudah dua kali tindakan anarkis pembongkaran rumah ibadah oleh umat Islam terhadap umat Kristen. Pengrusakan bangunan milik warga jemaat HKBP di kompleks perumahan Pondok Cilegon Indah (PCI) dan pembongkaran gereja Advent di Kota Cilegon.

Akibat peristiwa ini, Kota Cilegon mendapat predikat sebagai kota intoleran nomor satu di Indonesia berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Setara Institute pada Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2022 (Annur, 2023). Setara Institute menggunakan delapan indikator, dimana empat diantaranya adalah regulasi pemerintah kota tentang rencana kebijakan diskriminatif, tindakan pemerintah terhadap tindakan nyata terkait peristiwa intoleransi, regulasi sosial tentang dinamika masyarakat terhadap peristiwa intoleransi, dan demografi agama mengenai heterogenitas keagamaan penduduk serta inklusi sosial keagamaan.

Fenomena intoleransi yang menimbulkan konflik sering kali terjadi di Indonesia (Indrawan & Putri, 2022; A. Lestari & Randisa, 2024; Muhaemin & Sanusi, 2019; Riansyah et al., 2021), hal ini disebabkan karena Indonesia merupakan negara yang memiliki ragam suku, budaya maupun agama. Konflik menurut Robert MZ Lawang, adalah bentuk perjuangan dalam memperoleh status, nilai dan kekuasaan. Konflik dapat terjadi karena adanya ketidaksamaan tujuan, kepentingan serta nilai yang dipandang oleh individu atau kelompok

(Indrawan & Putri, 2022). Namun, konflik adalah sebuah peristiwa yang tak dapat dielakkan sehingga keberadaannya harus diterima serta dipersepsi positif (A. Lestari & Randisa, 2024; D. T. Lestari et al., 2023)

Dalam pemberitaan, ukuran suatu konflik yang terjadi dapat berpengaruh terhadap nilai berita. Semakin keras konflik tersebut maka nilai berita akan semakin tinggi dan menarik untuk diwartakan, sebab "*bad news is good news*" dalam pemberitaan media masih sangat berlaku. Selain itu jurnalis juga memiliki "*conflict interest*" yang dapat mempengaruhi isi berita sekaligus dapat menjadi kelemahan media dalam mewartakan suatu peristiwa untuk tetap bersikap netral dan jauh dari keberpihakan (Sirait et al., 2007)

Pada pemberitaan mengenai konflik, konsep jurnalisme damai perlu dijunjung tinggi. Pada dasarnya konsep mengenai jurnalisme damai adalah sebuah seruan untuk memahami dan memikirkan sebuah konflik dengan bijaksana, yaitu dengan mengungkapkan ketidakbenaran dari kedua pihak dan tetap berusaha bersikap netral dengan tidak adanya unsur keberpihakan pada suatu kelompok yang mengalami konflik (Hansyu et al., 2022). Jurnalisme damai mengusung bahwa media harus memberitakan konflik apa adanya dan hanya berfokus pada konflik saja sehingga tidak menimbulkan konflik lainnya (Said, 2020). Wartawan dan media, dalam perspektif jurnalisme damai harus memiliki berusaha mencari dan menginginkan perdamaian terjadi dalam konflik yang diberitakan tersebut (Rengkaningtyas, 2017).

Jurnalisme damai merupakan bentuk pelaporan konflik dengan cara mempromosikan pemahaman, penyelesaian, dan perdamaian daripada memperburuk kekerasan atau perpecahan. Jurnalisme damai ini dari jurnalisme perang (Ntulume, 2021). Sementara Johan Galtung memandang jurnalisme damai sebagai wadah untuk mengungkap latar belakang dan konteks terjadinya konflik yang digambarkan secara realistis dan terbuka kepada khalayak (Lynch & McGoldrick, 2014). Galtung sebagaimana dibahas Lynch & McGoldrick (2014) mengemukakan tujuan dari jurnalisme damai yakni mengungkapkan kebohongan, mengungkap upaya apapun yang tergolong untuk menutup-nutupi kejahatan, mengungkapkan penderitaan dari peristiwa konflik tersebut, dan mengedepankan laporan yang bersifat positif agar perdamaian tercapai termasuk perkembangan pasca konflik (Lynch & McGoldrick, 2014). Jurnalisme damai menurut Galtung terbagi kedalam empat elemen penting, yaitu: peace orientation (orientasi perdamaian), social orientation (orientasi masyarakat), truth orientation (orientasi kebenaran), resolution orientation (orientasi penyelesaian) (Lynch & McGoldrick, 2014; Sonni et al., 2023)

Ketika terjadi sebuah konflik dan media massa bersifat netral, hal itu merupakan implikasi peran jurnalisme sebagai jurnalisme damai atau peace journalism. Idealnya, media menyajikan informasi yang jujur, jernih, dan komprehensif tentang hal yang layak serta perlu diketahui oleh masyarakat sehingga dapat meredakan konflik (Santosa, 2016). Peran tersebut bertujuan menyebarkan berita perdamaian di daerah konflik sehingga konflik tidak semakin luas dan memanas. Dengan demikian, jurnalisme damai adalah sebuah media penengah atau netral sehingga menciptakan kedamaian, keharmonisan, dan kerukunan serta ditemukannya resolusi konflik antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

Penelitian mengenai konflik dan pemberitaan menjadi tema yang umum dilakukan. Beberapa penelitian antara lain penelitian Nuri dkk (2024) menyoroti pembingkai berita oleh Detik.com dan CNN Indonesia dalam kasus perdebatan hak tanah yang melibatkan pemerintah, masyarakat adat dan perusahaan. Pada tahun 2024, Nabila & An'amt (2024) juga meneliti mengenai pembingkai berita dan konflik Rempang pada media online

Batamtimes.co dan Batamnews.co. Penelitian Nabila & An'ama menyoroti pada dua media online di Batam serta menganalisis menggunakan perspektif teori konstruksi sosial Berger. Kedua penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa media memiliki tujuan tertentu dalam memberitakan sebuah peristiwa serta memiliki peran penting dalam membentuk opini publik. Penelitian lain dengan tema pbingkai berita juga pernah dilakukan oleh Rahmawati et al (2024) yang mengkaji pemberitaan kompas.com mengenai konflik antar etnis di Babarsari menggunakan teori second level agenda setting dalam mewartakan konflik yang melibatkan etnis Indonesia Timur di Yogyakarta pada tahun 2022 lalu. Hasil penelitian Rahmawati menunjukkan bahwa framing memiliki dominasi pada perspektif elite diindikasikan bahwa Kompas.com cenderung menekankan solusi formal dan institusional dalam pemberitaan konflik antaretnis tersebut. Berbeda dengan penelitian terdahulu, dalam penelitian ini akan dianalisis pemberitaan dari Kompas.com dan Detik.com dengan menggunakan model *Framing* yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Tak hanya media dan peristiwa konflik, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi media menyusun pemberitaan dalam perspektif jurnalisme damai mengenai konflik pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon yang menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Penelitian ini memilih Kompas.com dan Detik.com sebagai objek penelitian karena dua media ini merupakan media online yang banyak dikonsumsi di tahun 2022. Informasi tersebut didapat dari laman website databoks.katadata.co.id dimana laporan yang dirilis oleh Reuters Institute pada Digital News Report 2022 menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia menyerap sumber berita secara daring dengan persentase 88% (Pahlevi, 2022) Detik.com mencapai persentase sebanyak 65% sebagai media daring dengan pembaca terbanyak dan kemudian kompas.com persentase sebesar 48%. Kehadiran media baru di era internet mendiseminasi proses komunikasi massa yang tadinya *one to many* menjadi *many to many* (Nugu et al., 2020). Media online juga memiliki keunggulan dalam publikasi dimana media dapat mempublikasi berita kapan saja. Keunikan media online yang mudah diakses kapanpun juga menyediakan arsip berita di mana pembaca bisa membaca berita meski beritanya telah lama terpublikasi (Suyasa & Sedana, 2020). Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam praktik penulisan berita dengan konsep jurnalisme damai yang sesuai dengan etika dan prinsip-prinsip jurnalisme damai.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian hanya fokus pada makna terhadap fenomena yang terjadi pada kehidupan sosial yang terjadi (Amelia & Sukartik, 2022) dengan pendekatan jurnalisme damai (*peace journalism*) dan analisis data framing model Robert N. Entman. Model framing Robert N. Entman memiliki empat indikator, yaitu Define Problem, Diagnose Causes, Make Moral Judgement, dan Treatment Recommendation (Entman, 1993). Penelitian ini juga melihat cara media menggunakan prinsip jurnalisme damai dari Johan Galtung dalam pemberitaan. Adapun indikator jurnalisme damai menurut Johan Galtung adalah orientasi perdamaian, orientasi kebenaran, orientasi golongan masyarakat, dan orientasi pada solusi.

Pendekatan ini penting karena pemberitaan mengenai konflik sosial, terutama yang berkaitan dengan isu keagamaan dan pembangunan rumah ibadah, seringkali memiliki potensi untuk memperkeruh suasana jika tidak disajikan dengan pendekatan yang tepat.

Oleh karena itu, analisis framing digunakan untuk memahami bagaimana media mengemas suatu berita dan bagaimana narasi yang disampaikan dapat mempengaruhi pemahaman serta opini publik terkait konflik tersebut. Sementara itu, jurnalisisme damai menjadi perspektif yang berupaya menghadirkan pemberitaan yang lebih konstruktif, tidak provokatif, dan berorientasi pada solusi sehingga dapat meminimalisir prasangka serta ketegangan antar kelompok.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah berita yang terbit dalam media online detik.com dan kompas.com dengan isi berita terkait aksi damai penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon, dengan hasil adanya 36 berita yang dimuat pada detik.com dan 8 berita pada kompas.com. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* atau *judgment sampling*, yaitu pemilihan data secara sengaja dengan pertimbangan bahwa data tersebut relevan, representatif, dan sesuai dengan tujuan penelitian (Firmansyah & Dede, 2022). Adapun kriteria berita yang dijadikan sampel adalah berita yang dipublikasikan selama periode bulan September tahun 2022, berita memuat informasi tentang aksi damai penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon, dan berita tersebut berasal dari dua media daring utama yaitu Detik.com dan Kompas.com. Sampel penelitian ini adalah 8 berita yang dianggap terpercaya serta mewakili informasi pada masing-masing media online yang berkaitan dengan aksi damai penolakan pembangunan gereja di Kota Cilegon dan diberitakan pada periode September 2022 di detik.com dan kompas.com. Berita-berita yang dipilih dianalisis untuk melihat bagaimana media membingkai konflik ini, termasuk apakah terdapat bias dalam pemilihan diksi, sudut pandang yang lebih menonjol, serta apakah prinsip jurnalisisme damai telah diterapkan dalam pemberitaan. Sample yang dipilih juga memperhatikan berita-berita tersebut menampilkan perspektif berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta perwakilan kelompok yang mendukung maupun menolak pembangunan gereja. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana media membentuk wacana publik terkait konflik keagamaan di Kota Cilegon.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu bulan November hingga Desember 2023 dengan durasi efektif selama dua bulan. Pengumpulan data dilakukan selama empat minggu, yang meliputi pencarian, pengarsipan, dan analisis berita secara sistematis. Kemudian, untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan isi berita dari dua media yang berbeda, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan analisis isi, studi pustaka, dan dokumentasi (Rahayu Ratna Swastika, 2022).

Prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data dengan memilih dan menyederhanakan data dari berita yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dengan melakukan bentuk naratif dan tabel berdasarkan elemen framing Robert N. Entman dan indikator jurnalisisme damai Johan Galtung, dan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus menerus selama proses analisis berlangsung (Said, 2020).

## HASIL PENELITIAN

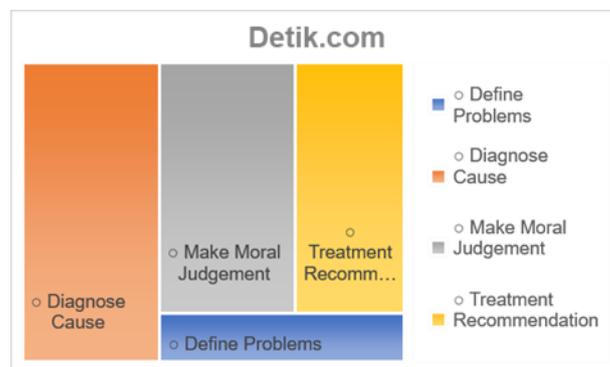
Selama kurun waktu bulan September 2022, ditemukan bahwa fokus pemberitaan Detik.com terkait dengan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon dan melakukan aksi damai penolakan

pembangunan gereja terdapat 36 berita dan untuk Kompas.com hanya terdapat 8 berita. Namun, yang menjadi sorotan adalah ketika pemberitaan konflik dari kedua media tersebut ketika adanya pengulangan berita mengenai alasan dilakukannya aksi damai serta dukungan Walikota Cilegon dengan ikut menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja.

Melalui hasil dari data yang diperoleh, tampak bahwa hasil analisis framing yang dilakukan pada kedelapan artikel Detik.com yang ditulis selama bulan September 2022, banyak yang meliputi mengenai penyebab terjadinya penolakan pembangunan gereja tersebut. Hal ini terlihat dari jumlah indikator yang paling banyak adalah Diagnose Cause (Gambar 1). Detik.com lebih banyak menguraikan mengenai alasan di balik masalah konflik penolakan gereja di Kota Cilegon.

Di samping itu, fokus utama berita juga menyoroti pernyataan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat yang menolak pembangunan gereja. Detik.com mencatat kalimat pengulangan sebanyak 48 kali yang mengandung latar belakang peristiwa, menunjukkan bahwa aspek historis dan regulasi lokal menjadi bagian yang sering dibahas dalam narasi berita. Salah satu contoh kalimat yang mengandung indikator tersebut terdapat dalam kutipan berikut: “Mereka menuntut anggota DPRD dan Wali Kota Cilegon untuk menegakkan peraturan daerah terkait pendirian rumah ibadah selain masjid” (Iqbal, 2022).

Selain mengangkat penyebab konflik, berita juga menunjukkan bagaimana aturan dan kebijakan daerah menjadi faktor penting dalam perdebatan ini. Regulasi yang dijadikan dasar penolakan cenderung ditekankan dalam berita, sehingga membentuk pandangan bahwa aspek hukum menjadi landasan utama dari konflik yang terjadi. Hal ini memiliki potensi untuk memperkuat wacana bahwa permasalahan ini bukan sekadar konflik sosial, tetapi juga berkaitan dengan interpretasi hukum dan kebijakan pemerintah daerah.



**Gambar 1. Hasil Analisis Framing Robert N Entman Konflik Pembangunan Gereja Cilegon: Detik.com,**  
Sumber: Olah Data Penulis, 2025

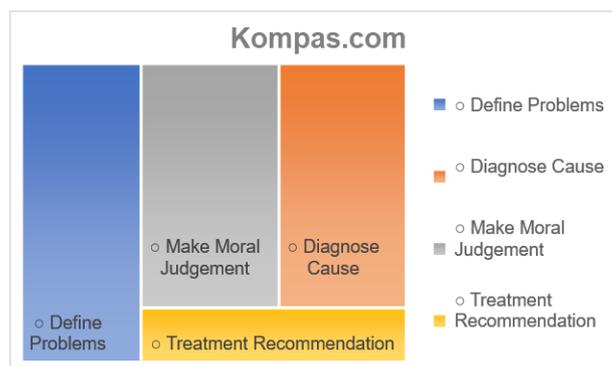
Pada 48 kali kalimat yang mengandung latar belakang sebagai kalimat dengan indikator *Diagnose Cause* juga banyak membahas mengenai bagaimana aksi penolakan tersebut terjadi, seperti pada berita yang berjudul “Warga Cilegon Tolak Pendirian Gereja, Ungkit SK Bupati Tahun 1975” pada berita tersebut beberapa kali disebutkan mengenai SK Bupati tahun 1975 yang menjadi akar penolakan tersebut terjadi. “Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang Nomor 189/Huk/SK/1975, Tertanggal 20 Maret 1975, tentang Penutupan Gereja/Tempat Jamaah bagi Agama Kristen dalam daerah

Kabupaten Serang mengatur dan menertibkan tentang ketentuan pendirian rumah ibadah di daerah Cilegon selain masjid” dan “Surat keputusan Bupati Serang tahun 1975 itu dianggapnya menjadi dasar bagi para penolak pendirian rumah ibadah” (Iqbal, 2022).

Pada Detik. com juga sering membahas mengenai bagaimana penolakan tersebut disokong oleh Wali Kota dan Wakilnya serta jajarannya yang mengandung indikator diagnose cause, seperti yang terlihat dalam berita berjudul “Duduk Perkara Wali Kota Cilegon Ikut Teken Petisi Tolak Bangun Gereja”. Dalam berita tersebut terdapat kalimat, “Massa diterima oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota di ruang rapat. Pada saat itu, massa dikatakan mendesak Walikota dan Wakil Walikota untuk ikut menandatangani kain putih sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembangunan gereja.” (Iqbal, 2022)

Selanjutnya, kalimat yang menyebut kelompok yang melakukan aksi damai paling banyak disebutkan dalam berita hingga 20 kali. Hal ini menunjukkan bahwa fokus utama pemberitaan lebih banyak menyoroti keberadaan massa aksi dibandingkan dengan faktor lain yang berperan dalam polemik tersebut. Untuk berita yang mengulas unsur perizinan pembangunan gereja disebut sebanyak 16 kali, yang mengindikasikan bahwa aspek legalitas juga menjadi perhatian. Sementara itu, berita mengenai Wali Kota Cilegon yang ikut menandatangani petisi penolakan disebut sebanyak 12 kali, memperlihatkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam dinamika konflik ini mendapatkan perhatian media yang cukup signifikan.

Kompas.com menunjukkan bahwa indikator terbanyak terdapat pada Definisi Masalah (Gambar 2), di mana jurnalis lebih mendalami penjelasan masalah dan menekankan pentingnya konflik sehingga dianggap mendesak untuk segera diatasi. Kalimat-kalimat dalam definisi masalah di Kompas.com diulang sebanyak 15 kali, dengan unsur-unsur kalimat yang ada lebih bersifat umum dan tidak memihak serta lebih condong kepada kelompok minoritas. Pendekatan ini menunjukkan kecenderungan untuk memberikan penekanan pada kesetaraan dan keadilan, serta mengutamakan sudut pandang kelompok yang seringkali diabaikan, sehingga menarik empati pembaca terhadap kondisi sosial yang dihadapi.



**Gambar 2. Hasil Analisis Framing Robert N Entman Konflik Pembangunan Gereja Cilegon: Kompas.com,**

Sumber: Olah Data Penulis, 2025

Terdapat perbedaan mencolok dalam cara kedua media ini menyampaikan perspektif terkait penyebab masalah dalam pemberitaan mereka. Kompas, dengan pendekatan yang lebih menekankan pada urgensi keberagaman dan kebutuhan akan tempat ibadah bagi pemeluk agama Kristen, menyebutkan bahwa populasi umat Kristen di Cilegon sudah mencapai ribuan

orang, yang memerlukan ruang ibadah yang lebih memadai. Mereka menyoroti pentingnya pembangunan gereja demi menghormati hak-hak minoritas dan memperkuat toleransi. Sementara itu, Detik. Com lebih mengangkat perspektif sejarah dan kontroversi hukum dengan menyoroti penolakan warga yang mengungkit kembali keputusan SK Bupati tahun 1975, yang dianggap sebagai dasar penolakan terhadap pembangunan tersebut. Pendekatan ini lebih berfokus pada isu legalitas dan ketidaksetujuan masyarakat lokal, yang memperburuk ketegangan dalam proses pembangunan rumah ibadah di Kota Cilegon.

### Jurnalisme damai dalam Berita Aksi Damai Penolakan Pembangunan Gereja di Detik.com dan Kompas.com

Berdasarkan jurnalisme damai yang dipaparkan oleh Galtung, pihak yang diwawancarai oleh media mengenai sebuah topik berita konflik haruslah adil. Dalam berita yang dirilis oleh detik. com, tampak bahwa pihak yang menolak pembangunan gereja HKBP di Cilegon Banten lebih banyak dimintai pendapatnya dalam memberikan keterangan berita tersebut. Dalam konteks ini, panitia pembangunan gereja tersebut memberikan keterangan sebanyak tiga kali dalam keseluruhan berita yang dirilis oleh detik. com. Berbeda dengan pihak yang menolak pembangunan itu, termasuk Wali Kota Cilegon, yaitu Hedy yang memberikan suara sebanyak empat kali dalam pemberitaan yang dirilis oleh Detik. com.

Selain Hedy, Detik. Com juga mengutip orator dalam aksi penolakan pembangunan gereja sebanyak tiga kali. Selanjutnya, dalam media Detik. com, FKUB Cilegon dikutip sebanyak satu kali. Dalam berita yang berjudul "FKUB Cilegon Jelaskan Awal Mula Polemik Penolakan Gereja", FKUB disebutkan berbicara mengenai kontroversi penolakan pembangunan gereja, "FKUB menyebut ada pemberian duit dari pihak panitia pembangunan gereja kepada warga." Dari kutipan tersebut, dengan menggunakan pemilihan kata "duit" dinilai bertentangan dengan konsep orientasi sosial pada indikator jurnalisme damai. Penggunaan kata "duit" mengarah pada stereotip negatif dan potensi kesalahpahaman yang dapat memperburuk konflik. Di samping itu, penekanan pada penggambaran bahwa pemberian itu bertujuan untuk mengelabui warga dapat meningkatkan ketegangan sosial. Idealnya, media seharusnya menghindari penyederhanaan masalah dengan narasi yang dapat memperburuk polarisasi dan sebaliknya lebih fokus pada upaya mencari solusi yang mendamaikan kedua belah pihak dalam konflik tersebut. Penggunaan kata-kata yang lebih netral dan tidak memiliki konotasi negatif akan lebih mendukung proses rekonsiliasi.



**Gambar 3. Hasil Analisis Jurnalisme Damai Johan Galtung Konflik Pembangunan Gereja Cilegon: Detik.com,**

Sumber: Olah Data Penulis, 2025

Berbeda dengan laporan di Detik. com, laporan mengenai pembangunan gereja di Cilegon pada media Kompas. com menunjukkan perbedaan fokus yang cukup signifikan. Pihak panitia pembangunan gereja, yang dianggap sebagai aktor yang mendukung pembangunan ini, diwawancarai dalam lima berita. Sementara itu, pihak yang menolak, yaitu Wali Kota Cilegon Hedy, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), lebih sedikit diwawancarai oleh wartawan Kompas. Hal ini menunjukkan adanya ketidakberimbangan media terhadap konflik tersebut, yang mengarah pada kesan bahwa perspektif yang mendukung pembangunan lebih diutamakan. Kondisi ini lebih jelasnya dapat dilihat melalui diagram berikut, yang menggambarkan proporsi pemberitaan serta jenis wawancara yang dilakukan oleh wartawan dari kedua pihak yang terlibat. Gambar hasil analisis akan memberikan gambaran visual yang lebih jelas tentang ketimpangan penyajian informasi dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu tersebut.



**Gambar 4. Hasil Analisis Jurnalisme Damai Johan Galtung  
Konflik Pembangunan Gereja Cilegon: Kompas.com,**  
Sumber: Olah Data Penulis, 2025

Selain itu, *Make Moral Judgment* dari Robert N. Entman dengan elemen pemilihan diksi atau pemilihan kata pada judul berita dari masing-masing media tidak netral serta terindikasi menimbulkan konflik lain (tabel 1). Hal ini terlihat dari media detik.com yang melakukan pengulangan kalimat “*tolak pendirian gereja*” di setiap judul yang dianalisis, hal ini mencerminkan adanya penggiringan opini masyarakat bahwa pendirian gereja harus ditolak, kalimat yang menyudutkan, provokasi serta menimbulkan kerugian bagi kelompok minoritas. Selain itu judul “*Ramai-ramai Bersuara Usai Viral Walikota Cilegon Tekken Penolakan Cilegon*” dan “*Walkot Jelaskan Syarat Belum Terpenuhi Terkait Pembangunan Gereja Cilegon*” memiliki kalimat dengan makna yang subjektif dan berpihak pada salah satu kelompok.

Pemilihan diksi pada judul di media kompas.com memiliki kalimat yang mengandung upaya perdamaian dan tidak subjektif. Tidak terlihat adanya unsur keberpihakan serta kata-katanya seimbang dan hanya menyoroti resolusi konflik dari sejumlah pemangku kepentingan. Hal itu terlihat dari judul berita, salah satunya adalah “*Kasus penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas*” , meskipun

di dalam berita tersebut terlihat sekali bentuk dukungan terhadap kelompok minoritas, dengan beberapa kalimat yang menyatakan keberpihakan seperti pemberitaan dengan narasumber Gufron Mabruuri sebagai Ketua Imparsial menyatakan “*mendesak kepala daerah untuk tidak memihak, serta menjalankan tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi setiap orang dan kelompok supaya dapat menjalankan hal beragamnya sebagaimana dijamin dalam UUD 1945*”.

**Tabel 1. Judul Berita Pada Masing-Masing Media (Hasil Analisis Make Moral Judgment)  
Analisis Make Moral Judgment)**

Detik.com	
08/09/2022	Warga Cilegon Tolak Pendirian Gereja, Ungkit SK Bupati Tahun 1975
09/09/2022	Duduk Perkara Walikota Cilegon Ikut Teken Petisi Tolak Bangun Gereja
09/09/2022	Kemenkumham Turun Tangan Usai Heboh Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon
09/09/2022	Panitia Ungkap Kendala Perizinan Pembangunan Gereja HKBP di Cilegon
10/09/2022	Ma'ruf Minta Menag-Mendagri Selesaikan Polemik Penolakan Gereja di Cilegon
10/09/2022	MUI Pusat Turunkan Tim Cari Duduk Perkara Penolakan Gereja di Cilegon
11/09/2022	Ramai-ramai Bersuara Usai Viral Walikota Cilegon Teken Penolakan Gereja
14/09/2022	Walkot Jelaskan Syarat Belum Terpenuhi Terkait Pembangunan Gereja Cilegon

Kompas.com	
08/09/2022	Duduk Perkara Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Banten
10/09/2022	Walikota Cilegon dan Wakilnya Tandatangani Penolakan Gereja, Maarif Institute: Melanggar Konstitusi
11/09/2022	Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tidak Diskriminasi Kelompok Minoritas
11/09/2022	Kemenag Undang Walikota Cilegon dan Sejumlah Tokoh, Selesaikan Masalah Penolakan Pembangunan Gereja
13/09/2022	Terkait Pembangunan Gereja, Walikota Cilegon Bakal Hadir ke Kantor Kemenag Besok
14/09/2022	Polemik Pembangunan Gereja, Walikota Sebut Sebagian Warga Cabut Dukungan
14/09/2022	Tangani Petisi Tolak Pembangunan Gereja, Walikota Cilegon Sebut Ikut Keinginan Warga
20/09/2022	Rencana Detail Pembangunan Gereja HKBP di Kota Cilegon

Sumber: Olah Data Penulis, 2025

Untuk hasil analisis dengan elemen *resolution orientation* berdasarkan solusi yang diberitakan oleh kedua media, masing-masing media melakukan keberpihakan. Kompas.com

dari delapan berita yang kami analisis, dapat kami simpulkan bahwa solusi yang diberitakan lebih mengerucut pada kebijakan pemerintah Kota Cilegon agar mengikuti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 Tahun 2006 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Dari hal tersebut, maka kebijakan pemerintah mengacu pada peraturan terbaru bukan lagi SK Bupati tahun 1975. Sedangkan pemberitaan detik.com terkait solusi atas penolakan pendirian rumah ibadah bahwa masyarakat Kota Cilegon dimana diwakili oleh Komite Penyelamat Kearifan Lokal Kota Cilegon meminta Pemerintah Kota Cilegon agar dapat segera mengeluarkan Surat Keputusan terbaru yang mendukung SK Bupati Serang Ronggo Waluyo Nomor 189/Huk/SK/1975 tanggal 20 Maret 1975 mengenai Penutupan Gereja/Tempat Jamaan bagi Agama Kristen di daerah Kabupaten Serang (sekarang Kota Cilegon).

## PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini, analisa menggunakan teori Framing Robert N. Entman dengan empat elemen utama dalam framing berita, yaitu Define Problem, Diagnose Causes, Make Moral Judgment, dan Treatment Recommendation (Entman, 1993). Penelitian ini mengkaji perbedaan *framing* media daring [Kompas.com](http://Kompas.com) dan [Detik.com](http://Detik.com) dalam memberitakan penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa [Kompas.com](http://Kompas.com) membingkai isu dengan penekanan pada nilai-nilai konstitusional dan perlindungan terhadap kelompok minoritas, sedangkan [Detik.com](http://Detik.com) cenderung mengafirmasi aspirasi masyarakat mayoritas dan narasi kearifan lokal. Temuan ini sejalan dengan memperluas hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mengangkat isu *framing* media dalam konflik sosial dan keagamaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nabila & An'amta, 2024) mengkaji pembedaan media terhadap konflik agraria di Pulau Rempang, dan menunjukkan bahwa media lokal seperti [Batamtimes.co](http://Batamtimes.co) dan [Batamnews.co](http://Batamnews.co) cenderung memihak pada kebijakan pemerintah dan pembangunan proyek Rempang Eco City. Penekanan berulang pada narasi pembangunan dan investasi menunjukkan bahwa media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi turut mengkonstruksi realitas sosial sesuai kepentingan tertentu. Temuan ini selaras dengan penelitian ini, di mana [Detik.com](http://Detik.com) memperkuat posisi kelompok dokinan dengan mengedepankan narasi "penolakan masyarakat" dan keberlakuan SK Bupati 1975.

Lebih lanjut, penelitian oleh (Nuri et al., 2024) yang membandingkan *framing* antara [Detik.com](http://Detik.com) dan CNN Indonesia dalam memberitakan konflik Rempang juga menunjukkan pola serupa. [Detik.com](http://Detik.com) cenderung menonjolkan solusi praktis dan narasi faktual, sementara CNN Indonesia lebih reflektif dan analitis. Kecenderungan [Detik.com](http://Detik.com) untuk mengedepankan narasi populis dan penekanan pada legitimasi lokal juga ditemukan dalam pemberitaannya terhadap kasus HKBP Maranatha, memperkuat karakter media ini sebagai representasi aspirasi mayoritas yang pragmatis.

Penelitian (Amelia & Sukartik, 2022) tentang *framing* [Kompas.com](http://Kompas.com) dalam memberitakan konflik antaretnis di Babarsari Yogyakarta menegaskan kecenderungan media ini dalam mengedepankan perspektif elite dan institusional, dengan fokus pada penyelesaian melalui pendekatan hukum dan kebijakan formal. Dalam konteks penelitian ini, [Kompas.com](http://Kompas.com) juga menekankan pentingnya perlindungan konstitusional dan pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006, yang

menunjukkan konsistensi media ini dalam membingkai isu berdasarkan kerangka hukum nasional dan nilai pluralisme.

Sementara itu, penelitian Monika Wutun (Monika et al., 2022) mengenai *framing* citra kepala daerah NTT dalam pemberitaan pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa media berperan penting dalam membentuk citra tokoh publik melalui narasi tertentu. Hal ini relevan dengan temuan dalam penelitian ini, dimana Kompas.com membingkai kelompok pendukung gereja sebagai representasi hak asasi dan pluralisme, sedangkan Detik.com membingkai kelompok penolak sebagai penjaga kearifan lokal. *Framing* ini tidak hanya mempengaruhi persepsi terhadap peristiwa tetapi juga membentuk citra sosial dari masing-masing kelompok yang terlibat dalam konflik (Monika et al., 2022).

Selain itu, penelitian Wutun, Mas'ama dan Meilawati (Monika et al., 2022) mengenai jurnalisme empati menunjukkan bahwa media seharusnya menonjolkan sisi *human interest* dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pemberitaan, terutama pada isu-isu sensitif. Kompas.com dalam penelitian ini menunjukkan penerapan prinsip jurnalisme empati dengan menampilkan narasi keberagaman, hak minoritas, dan pentingnya toleransi. Sebaliknya Detik.com tidak banyak menampilkan perspektif minoritas, sehingga *framing* yang dihasilkan cenderung mengabaikan sisi kemanusiaan kelompok yang mengalami diskriminasi.

Dalam konteks *define problems*, menurut teori Entman, Define Problems mengacu pada cara media mengidentifikasi dan mendefinisikan suatu isu sebagai sebuah masalah. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Detik.com lebih menekankan pada penolakan pembangunan gereja sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk mempertahankan kearifan lokal. Sebaliknya, Kompas.com lebih banyak menyoroiti konflik ini sebagai permasalahan intoleransi agama yang perlu segera diselesaikan. Bias ideologis dapat menciptakan stereotip negatif terhadap kelompok tertentu, hal ini menunjukkan bahwa framing bukan hanya berperan dalam penyampaian berita, tetapi juga dalam pembentukan opini publik jangka panjang (Ramadhan, 2023)

Kompas.com lebih banyak menggunakan elemen define problems dalam pemberitaannya. Media ini menyoroiti urgensi penyelesaian konflik, dengan menampilkan isu keberagaman dan hak minoritas dalam menjalankan ibadahnya. Pemberitaan Kompas.com lebih sering memberikan ruang bagi kelompok yang mendukung pembangunan gereja, sehingga menampilkan perspektif yang lebih berpihak pada kelompok minoritas. Kompas.com lebih banyak menampilkan urgensi perlindungan hak minoritas dalam kebebasan beragama. Pemberitaan Kompas.com cenderung menyoroiti bagaimana penolakan pembangunan gereja bertentangan dengan konstitusi dan peraturan terbaru seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006.

Sedangkan pada media Detik.com mengulang frasa seperti “penolakan pembangunan gereja” dan “tuntutan masyarakat” sebanyak 48 kali dalam berbagai pemberitaan. Hal ini mengindikasikan bahwa media ini membingkai masalah sebagai benturan antara aspirasi masyarakat mayoritas dan kebijakan pemerintah yang dianggap kurang tegas dalam menegakkan peraturan daerah. Perbedaan ini sejalan dengan penelitian McQuail (2010) yang menyatakan bahwa media memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan narasi dengan audiensnya. Dengan kata lain, media dapat mengarahkan opini publik melalui pemilihan sudut pandang yang berbeda terhadap sebuah konflik.

Pada elemen *diagnose causes* dalam teori Entman mengacu pada bagaimana media mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik. Dalam penelitian ini, ditemukan perbedaan

signifikan dalam cara Detik.com dan Kompas.com menjelaskan akar masalah penolakan gereja. Hasil analisis menunjukkan bahwa Detik.com cenderung menonjolkan aspek diagnose cause, yakni dengan mengangkat penyebab konflik secara berulang, seperti merujuk pada SK Bupati Serang Nomor 189/Huk/SK/1975 dan keterlibatan Wali Kota Cilegon dalam penolakan pembangunan gereja. Pemberitaan Detik.com juga banyak menampilkan suara kelompok yang menolak pembangunan gereja, sehingga berpotensi menggiring opini publik bahwa penolakan ini memiliki dasar kuat.

Detik.com mengaitkan penolakan gereja dengan keberadaan Surat Keputusan Bupati Serang 1975, yang melarang pembangunan rumah ibadah non-Muslim di Cilegon. Berita-berita di Detik.com sering mengulang klaim bahwa aturan tersebut masih sah dan menjadi dasar bagi masyarakat untuk menolak pembangunan gereja. Selain itu, media ini juga mengedepankan pernyataan tokoh-tokoh yang menegaskan keberlanjutan keberlakuan keputusan tersebut, seolah menjadi landasan moral dalam menentang perkembangan agama selain Islam di wilayah tersebut. Framing media online juga membingkai isu dengan cara berbeda, mempengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi dan urgensi wacana tersebut (Lisa & Kusuma, 2023).

Media Kompas.com menghubungkan konflik ini dengan meningkatnya jumlah umat Kristen di Cilegon dan perlunya fasilitas ibadah yang memadai. Media ini juga menyoroti bagaimana regulasi terbaru seharusnya menggantikan aturan lama yang dianggap diskriminatif. Kompas.com menggambarkan permasalahan sebagai kebutuhan untuk merespons dinamika sosial yang berkembang, dengan memberikan gambaran lebih luas tentang pluralitas agama dan hak warga negara untuk beribadah. Temuan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Rahayu Ratna Swastika, 2022) yang menemukan bahwa media seringkali memiliki pola penyampaian berita yang berbeda tergantung pada bagaimana mereka mendefinisikan akar masalah, baik dari sisi hukum, sosial, maupun nilai-nilai kebangsaan yang diterima secara luas oleh masyarakat.

*Elemen make moral judgment* dalam teori Entman berkaitan dengan cara media memberikan penilaian etis terhadap suatu konflik. Dalam kasus ini, ditemukan bahwa pemilihan diksi dalam berita di kedua media mengandung indikasi keberpihakan. Detik.com menggunakan frasa-frasa seperti "tolak pendirian gereja" secara berulang dalam judul beritanya, yang berpotensi membangun opini negatif terhadap kelompok minoritas. Detik.com juga menggunakan kata-kata seperti "aksi damai menolak gereja" dan "tuntutan masyarakat". Penggunaan diksi ini cenderung memberikan justifikasi terhadap aksi penolakan, seolah-olah penolakan tersebut adalah sesuatu yang wajar dan harus dihormati. Hal ini menunjukkan perbedaan framing antara media dalam menanggapi isu radikalisme, dimana media menonjolkan aspek tertentu dari konflik sesuai dengan sudut pandangnya (Al-Hakim, 2022).

Sebaliknya, Kompas.com menggunakan diksi yang lebih netral dan berorientasi pada penyelesaian konflik, seperti dalam berita yang menyoroti pentingnya pemerintah daerah menjalankan kebijakan yang tidak diskriminatif. Kompas.com juga lebih sering menggunakan istilah seperti "diskriminasi agama", "pelanggaran konstitusi", dan "hak minoritas beribadah". Ini menunjukkan kecenderungan untuk menampilkan penolakan pembangunan gereja sebagai bentuk ketidakadilan yang harus segera ditindak. Kecenderungan media untuk membangun moral judgment ini juga ditemukan dalam penelitian (Muhaemin & Sanusi, 2019), yang menunjukkan bahwa media seringkali tidak netral dalam meliput konflik keagamaan.

Pada Elemen terakhir dalam teori framing Entman adalah *treatment recommendation*, yang merujuk pada solusi yang ditawarkan oleh media dalam penyelesaian konflik. Dalam hal solusi yang ditawarkan, Kompas.com lebih banyak menyoroti perlunya pemerintah mengikuti regulasi terbaru seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006. Hal ini menyoroti bagaimana media yang memiliki afiliasi dengan pemerintah atau kelompok tertentu membingkai isu secara berbeda, tergantung pada ideologi media tersebut. Ini memperkuat bahwa afiliasi dan orientasi media mempengaruhi konstruksi realitas sosial (Herlina & Firmonasari, 2023).

Kompas.com, menampilkan solusi yang merujuk pada regulasi nasional, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri 2006, yang menegaskan bahwa pendirian rumah ibadah harus mengikuti aturan terbaru dan menjunjung tinggi hak kebebasan beragama. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, serta bagaimana regulasi ini dapat memberikan landasan yang jelas dan adil bagi berbagai kelompok masyarakat. Di sisi lain, Detik.com lebih banyak menampilkan tuntutan kelompok penolak gereja agar SK Bupati 1975 tetap dijadikan acuan.

Detik.com cenderung menyoroti permintaan masyarakat agar pemerintah daerah mengeluarkan regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi kearifan lokal. Media ini juga memberikan ruang bagi suara kelompok yang ingin agar SK Bupati 1975 tetap dipertahankan sebagai dasar hukum. Dalam hal ini, Detik.com lebih memperlihatkan kesenjangan antara kebijakan nasional dan kepentingan lokal yang ada di masyarakat.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kedua media memiliki kecenderungan yang berbeda dalam memberitakan solusi atas konflik tersebut. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan Lynch & McGoldrick (Lynch & McGoldrick, 2014), yang menekankan bahwa framing berita tidak hanya mempengaruhi bagaimana konflik dipahami, tetapi juga bagaimana solusi dipersepsikan oleh masyarakat. Dengan demikian, masing-masing media memberi perspektif yang beragam terhadap penyelesaian konflik yang ada, mencerminkan kompleksitas dinamika sosial dan politik yang sedang berlangsung.

Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi strategis dalam kajian *framing* media di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat validitas model *framing* Entman dalam menganalisis dinamika pemberitaan isu keagamaan. Secara empiris, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa perbedaan orientasi dan afiliasi media turut membentuk cara pandang publik terhadap isu intoleransi dan pluralisme. Secara metodologis, penelitian ini memperkuat keabsahan model Entman untuk mengidentifikasi perbedaan representasi media terhadap isu sensitif.

Secara substansi, penelitian ini memperluas pemahaman kita tentang bagaimana media nasional memosisikan diri antara narasi kebangsaan, pluralisme, dan konservatisme lokal. Penelitian ini juga menambah literatur tentang bagaimana *framing* berita tidak hanya membentuk persepsi publik terhadap isu, tetapi juga berperan dalam pembentukan norma sosial dan arah kebijakan publik melalui media. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperluas pemahaman akademik mengenai konstruksi media terhadap konflik sosial, tetapi juga mendorong refleksi kritis terhadap peran media dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penjabaran tersebut di atas, selain adanya pergeseran peran media

saat ini dengan pemberitaan kedua media yaitu *kompas.com* dan *detik.com* terhadap aksi damai penolakan pendirian rumah ibadah di Kota Cilegon, merupakan keadaan dimana media hanya memberikan informasi serta membentuk opini publik serta memanfaatkan momentum untuk menambah jumlah pembaca dan menggiring isu tersebut kepada sebuah konflik krusial yang perlu dipertahankan dan dijaga tanpa melihat sudut pandang kelompok minoritas dan kebutuhan masing-masing agama dalam beribadah sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 Tahun 2006.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberitaan *Detik.com* dan *Kompas.com* terkait penolakan pembangunan Gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon memiliki framing yang berbeda. *Detik.com* lebih banyak menyoroti perspektif kelompok yang menolak pembangunan gereja dan menggunakan diksi yang dapat membentuk opini negatif terhadap kelompok minoritas. Sementara itu, *Kompas.com* lebih banyak menampilkan urgensi penyelesaian konflik dengan menekankan pentingnya perlindungan hak beribadah bagi kelompok minoritas.

Menurut konsep jurnalisme damai oleh Johan Galtung, media seharusnya menampilkan informasi secara berimbang dan mendorong resolusi konflik (Lynch & McGoldrick, 2005). Namun, penelitian ini menemukan bahwa baik *Detik.com* maupun *Kompas.com* tidak sepenuhnya menerapkan prinsip jurnalisme damai. *Detik.com* lebih condong membingkai isu dari perspektif kelompok yang menolak pembangunan gereja, sementara *Kompas.com* menampilkan lebih banyak dukungan terhadap kelompok minoritas. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa media masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ideologi dan kepentingan bisnis, sebagaimana diungkap dalam studi tentang framing konflik di media online (Rahayu Ratna Swastika, 2022).

Menilik hasil dari analisis berdasarkan jurnalisme damai yang dikemukakan oleh Johan Galtung dan melalui konsep elemen Robert N. Entman, maka disimpulkan bahwa *detik.com* dan *kompas.com* sama-sama tidak berimbang dalam memberitakan konflik pendirian gereja HKBP Maranatha di Kota Cilegon, hal ini dilihat dari beberapa sudut pandang isi berita kedua media dalam melihat peristiwa tersebut. *Detik.com* dan *kompas.com* tidak menerapkan prinsip jurnalisme damai Johan Galtung terlihat dari beberapa narasumber yang tidak berimbang di setiap berita untuk dimintai keterangan dalam pemberitaan pemberitaan peristiwa konflik tersebut. Terakhir, *detik.com* dan *kompas.com* masing-masing dari keduanya saling berpihak pada salah satu kelompok, *detik.com* cenderung lebih sering memberitakan dan wawancara pihak-pihak yang kontra dengan pendirian gereja, sedangkan *kompas.com* justru sebaliknya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa framing berita tidak hanya mempengaruhi cara publik memahami suatu konflik, tetapi juga bagaimana mereka melihat solusi yang ditawarkan. Sebagai implikasi, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi jurnalis dan akademisi mengenai pentingnya netralitas dalam peliputan isu sensitif seperti konflik keagamaan. Untuk penelitian selanjutnya, direkomendasikan agar dilakukan wawancara dengan redaksi media guna memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi framing berita.

Peneliti menyadari bahwa adanya keterbatasan pada penelitian ini sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan lebih lanjut untuk mencari tahu ideologi *Kompas.com* dan *Detik.com* melalui observasi dan wawancara mendalam guna mengetahui faktor-faktor yang turut serta mempengaruhi isi pemberitaan dari kedua media nasional tersebut.

## REFERENSI

- Al-Hakim, L. (2022). Pemberitaan Media Online Terhadap Radikalisme di Garut Jawa Barat (Analisis Framing Detik.Com dan Okezone.Com). *Interaksi Peradaban: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 192–218. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/interaksi/article/view/27706>
- Alfons, M., & Iqbal, M. (2022). Duduk Perkara Walkot Cilegon Ikut Teken Petisi Tolak Bangun Gereja. <https://news.detik.com/berita/d-6281340/duduk-perkara-walkot-cilegon-ikut-teken-petisi-tolak-bangun-gereja>
- Amelia, U. S., & Sukartik, D. (2022). Penerapan Jurnalisme Damai Dalam Pemberitaan Kudeta Myanmar Di Media Online Kompas.Com. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v4i1.18498>
- Annur, C. M. (2023, April 11). *Inilah Kota Paling Toleran di Indonesia pada 2022 Versi Setara Institute, Singkawang Teratas*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/dc84e3c8b0b6c89/inilah-kota-paling-toleran-di-indonesia-pada-2022-versi-setara-institute-singkawang-teratas>
- Arifinsyah, & Fitriani. (2019). Konflik Rumah Ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang) Arifinsyah dan Fitriani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. *Jurnal Ushuluddin*, 18(1).
- Efendi, E., Siregar, M. H., & Hasan, A. (2024). *Framing Media Republika Dan Kompas Terhadap Konflik Palestina Dan Israel*. 2, 233–250.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114.
- Fithri, M. Z., Abidin, S., & Jailani, M. (2023). ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KONFLIK GANJAR PRANOWO VERSUS PUAN MAHARANI PADA MEDIA ONLINE DETIKCOM. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(1), 1465–1474. <https://doi.org/10.25130/sc.24.1.6>
- Hansyu, M. F., Fakhruroji, M., & Risdayah, E. (2022). Pemahaman Wartawan AJI Mengenai Jurnalisme Damai. *Annaba: Jurnal Ilmu Jurnalistik*, 7(4), 419–440.
- Harcup, T. (2020). What's the point of news?: A study in ethical journalism. In *What's the Point of News?: A Study in Ethical Journalism*. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-39947-4>
- Harsa, A. N. P., & Rofil, L. E. F. (2021). Papua and the public: News framing of the 2019 Asrama Papua conflict. *Pacific Journalism Review: Te Koakoa*, 27(1 & 2), 105–118. <https://doi.org/10.24135/PJR.V27I1AND2.1173>
- Herlina, D., & Firmonasari, A. (2023). HUMANIS Journal of Arts and Humanities Ideologi Media dan Pembingkai Berita Masjid Al Jabbar di Portal Jabarprov dan Jabar News Media Ideology and Framing of Al Jabbar Mosque News on Portal Jabarprov and Jabar News. *Journal of Arts and Humanities*, 27, 328–341. <https://doi.org/10.24843/JH.20>
- Indrawan, J., & Putri, A. T. (2022). Analisis Konflik Ambon Menggunakan Penahapan Konflik Simon Fisher. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 12–26. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.36608>
- Iqbal, M. (2022, September 8). *Warga Cilegon Tolak Pendirian Gereja, Ungkit SK Bupati Tahun 1975*. detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6279957/warga-cilegon-tolak-pendirian-gereja-ungkit-sk-bupati-tahun-1975>
- Lestari, A., & Randisa, A. R. (2024). *FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB POLEMIC PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA HKBP MARANATHA DI KOTA CILEGON*. 9, 220–227.

- Lestari, D. T., Sultrayansa, S., & Ako, R. (2023). Model Komunikasi Pekerja Lokal Dan Asing Pada PT. Virtue Dragon Nickel Industry. *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 12(1), 73–86. <https://doi.org/10.35508/jikom.v12i1.8794>
- Lisa, L., & Kusuma, R. A. (2023). Framing Pemberitaan Jokowi 3 Periode Dalam Mengkontruksi Realitas Di Media Online. *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(2), 88–109. <https://doi.org/10.32923/dla.v2i2.3707>
- Lynch, J., & McGoldrick, A. (2014). *Peace Journalism*. Hawthorn Press.
- Monika, W., Mas'Amah, & Titi Meilawati, F. (2022). Pembingkatan Citra Kepala Daerah Provinsi NTT Terpapar Covid-19 Pada Berita Kupang.Antaraneews.Com. *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 11(2), 132–148. <https://kupang.antaranews.com/>
- Mudjiyanto, B., Lusianawati, H., & Launa. (2023). Dinamika Studi Media: Dari Agenda Setting, Agen Konstruksi, Sarana Representasi, Hingga Alat Konsensus Sosial. *Jurnal Oratio Directa*, 5(1), 943–971. <https://www.ejurnal.ubk.ac.id/index.php/oratio/article/view/428>
- Muhaemin, E., & Sanusi, I. (2019). Intoleransi Keagamaan dalam Framing Surat Kabar Kompas. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 17–34. <https://doi.org/10.15575/cjik.v3i1.5034>
- Nabila, M. K., & An'amta, D. A. A. (2024). Konflik Rempang Dalam Bingkai Media (Analisis Framing Media Online batamtimes.co dan batamnews.co). *Huma: Jurnal Sosiologi*, 3(4), 338–350. <https://doi.org/10.20527/h-js.v3i4.345>
- Ntulume, C. (2021). Resolution, resistance, resilience: Covering the conflict in South Sudan. In K. S. Orgeret (Ed.), *Insights on Peace and Conflict Reporting* (pp. 61–74). <https://doi.org/10.4324/9781003015628>
- Nugu, M. W., Manafe, Y. D., & Swan, M. V. D. P. (2020). Media Baru dalam Konstruksi Jurnalis Media Cetak. *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 1601–1612. <https://doi.org/10.35508/jikom.v9i2.2765>
- Nuri, Tjoetra, A., & Fahrimal, Y. (2024). Analisis Framing Media Detik.com dan CNN Indonesia pada Pemberitaan Konflik Pulau Rempang. *Jurnal Publish*, 3(1), 1–129.
- Pahlevi, R. (2022, June 16). *Ini Media Online Paling Banyak Dikonsumsi Warga Indonesia*. Databoks.
- Rahayu Ratna Swastika, H. U. (2022). Jurnalisme Damai Dalam Media Online (analisis Pemberitaan Konflik Wadas pada Kompas.com dan Detik.com). *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5, 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/lektur.v5i3.19172>
- Rahmawati, D. S. P., Rahardjo, T., & Sunarto, S. (2024). ANALISIS FRAMING DALAM PEMBERITAAN KONFLIK ANTARETNIS DI BABARSARI PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM. *Interaksi Online*, 13(1), 890–905. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/interaksi-online/article/view/48896>
- Ramadhan, H. F. A. (2023). Islamofobia dan Konstruksi Media Massa. *Jurnal PIKMA : Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 5(2), 205–215. <https://doi.org/10.24076/pikma.v5i2.1058>
- Rengkaningtyas, A. U. (2017). Jurnalisme Damai (Peace Journalism) dalam Kerukunan Antarumat Beragama (Analisis Framing Kompas.com terhadap Isu Rohingnya). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2), 163–184.
- Riansyah, A., Mulyani, M., AL-Giffari, M. F., Akbar, S. F., & Hulailah, S. (2021). Faktor Penolakan Pembangunan Gereja Oleh Masyarakat di Kota Cilegon. *Ijd-Demos*, 3(1), 43–52.

- <https://doi.org/10.37950/ijd.v3i1.79>
- Said, I. (2020). MEDIA DAN KONFLIK : MEWUJUDKAN JURNALISME DAMAI. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 3(1), 2655–7320. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jmks/article/view/18473>
- Santosa, B. A. (2016). Jurnalisme Damai dan Peran Media Massa dalam Mengatasi Konflik di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Islam*, 6(2), 280–300.
- Saptohutomo, A. P. (2022, September 11). *Kasus Penolakan Gereja di Cilegon, Imparsial Minta Kepala Daerah Tak Diskriminasi Kelompok Minoritas*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/11/15143501/kasus-penolakan-gereja-di-cilegon-imparsial-minta-kepala-daerah-tak>
- Sirait, H. P., Firmansyah, Gaban, F., & Anto, J. (2007). *Meretas jurnalisme damai di Aceh: kisah reintegrasi damai dari lapangan* (J. Anto & P. Pardede (eds.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjafari, A. (2014). Pemetaan Konflik Sosial Di Kota Cilegon Provinsi Banten. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(2). <https://doi.org/10.31506/jap.v5i2.2399>
- Sonni, A. F., Irwanto, I., & Malau, M. H. (2023). Peaceful journalism in reporting conflict in Papua on the news portals. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 8(1), 161–173. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v8i1.26980>
- Suyasa, I. M., & Sedana, I. N. (2020). Mempertahankan Eksistensi Media Cetak Di Tengah Gempuran Media Online. *Jurnal Komunikasi Dan Budaya*, 1(1), 56–64. <https://doi.org/10.54895/jkb.v1i1.314>